



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Dengan : Eselon I Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
1. Ditjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI;  
2. Ditjen Binwasnaker Kemenakertrans RI;  
3. Setjen Kemenakertrans RI;  
4. Ditjen Binalattas Kemenakertrans RI;  
5. Ditjen Binapenta Kemenakertrans RI.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Selasa, 27 September 2011  
Pukul : 09.00 WIB – selesai  
Acara : Pembahasan RKA-KL Tahun 2012 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.  
Ketua Rapat : 1. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;  
2. dr. Ahmad Nizar Shihab, SpAn/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI;  
3. Ir. Soepriyatno/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI.  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Mahogany Room, Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang.  
Jumlah Kehadiran : orang dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI  
orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 09.05 WIB oleh Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR-RI dapat menerima pagu sementara/anggaran Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI sebesar Rp **231.000.000.000** (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Rupiah*) dengan catatan harus merevisi program dan kegiatan yang memfokuskan pada penyelesaian PHI berdasarkan masukan dari Anggota Komisi IX DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini Selasa, 27 September 2011.
2. Komisi IX DPR-RI akan mengkoordinasikan usulan tambahan anggaran Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI sebesar Rp **50.000.000.000** (*Lima Puluh Milyar Rupiah*) untuk mengoptimalkan penyusunan dan revisi kebijakan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
3. Komisi IX DPR-RI meminta Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI menyampaikan rekap kasus Penyelesaian Hubungan Industrial dan data kepesertaan Jamsostek Tahun 2010 dan Tahun 2011, untuk disampaikan selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011.

Rapat diskors pada pukul 10.40 WIB dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Binwasnaker Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, setelah skors dicabut pada pukul 10.45 WIB, dipimpin dr. Ahmad Nizar Shihab, SpAn/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI menghasilkan Keputusan sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR-RI dapat menerima pagu sementara/anggaran Direktorat Jenderal Binwasnaker Kemenakertrans RI sebesar Rp **232.540.000.000** (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) dengan catatan memperhatikan masukan dari Anggota Komisi IX DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini Selasa, 27 September 2011.
2. Komisi IX DPR-RI akan mengkoordinasikan usulan tambahan anggaran Direktorat Jenderal Binwasnaker Kemenakertrans RI sebesar Rp **77.560.000.000** (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
3. Komisi IX DPR-RI meminta Direktorat Jenderal Binwasnaker Kemenakertrans RI menyampaikan rekap hasil kegiatan pengawasan ketenagakerjaan Tahun 2010 dan Tahun 2011 serta jawaban tertulis atas pertanyaan dalam RDP hari ini, untuk disampaikan selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011.
4. Komisi IX DPR-RI mendesak Kemenakertrans RI untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Jamsostek sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.

Rapat diskors pada pukul 13.05 WIB dan pukul 14.00 WIB dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, setelah skors dicabut pada pukul 14.15 WIB, rapat dipimpin oleh Drs. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, menghasilkan Keputusan sebagai berikut

1. Komisi IX DPR-RI dapat menerima pagu sementara/anggaran Sekretariat Jenderal Kemenakertrans RI sebesar **Rp 293.969.084.000** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan catatan harus merevisi program dan kegiatan, serta melakukan sinkronisasi berdasarkan masukan dari Anggota Komisi IX DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini Selasa, 27 September 2011.
2. Komisi IX DPR-RI akan mengkoordinasikan usulan tambahan anggaran Sekretaris Jenderal Kemenakertrans RI sebesar **Rp 67.603.000.000** (*Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Rupiah*) untuk penyelesaian regulasi, peningkatan kinerja Kemenakertrans RI, dan pembangunan gedung parkir dengan mempertimbangkan skala prioritas.
3. Komisi IX DPR-RI meminta Sekretaris Jenderal Kemenakertrans RI menyampaikan rekap hasil realisasi program dan realisasi dukungan administrasi Kemenakertrans Tahun 2010 dan Tahun 2011, untuk disampaikan selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011.

Rapat diskors pada pukul 15.34 WIB dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, setelah skors dicabut pada pukul 15.37 WIB, rapat belum menghasilkan Keputusan dan ditunda sampai Ditjen Binalattas memperbaiki Laporan RKA KL Tahun 2012.

Rapat diskors pada pukul 16.10 WIB dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, setelah skors dicabut pada pukul 16.12 WIB, dipimpin dr. Ahmad Nizar Shihab, SpAn/Wakil Ketua DPR-RI, menghasilkan Keputusan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR-RI dapat menerima pagu sementara/anggaran Direktorat Jenderal Binapenta Kemenakertrans RI sebesar **Rp 697.101.966.000** (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan catatan harus merevisi program dan kegiatan berdasarkan masukan dari Anggota Komisi IX DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini Selasa, 27 September 2011. Khusus untuk kegiatan Pembinaan dan Perlindungan TKILN akan dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar tidak ada program yang tumpang tindih.

2. Komisi IX DPR-RI akan mengkoordinasikan usulan tambahan anggaran Direktorat Jenderal Binapenta Kemenakertrans RI sebesar **Rp 601.120.000.000** (*Enam Ratus Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*) untuk operator dan peralatan bursa kerja *online*, penambahan fasilitas antarkerja, informasi dan penyelesaian masalah TKI, serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan skala prioritas.
3. Komisi IX DPR-RI meminta Direktorat Jenderal Binapenta Kemenakertrans RI menyampaikan rekap hasil pembinaan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus-kasus hukum Tahun 2010 dan Tahun 2011, serta menyerahkan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dalam RDP hari ini untuk disampaikan selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011.

Rapat diskors pada pukul 19.57 WIB dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, setelah skors dicabut pada pukul 20.00 WIB, dipimpin Ir. Soepriyatno/Wakil Ketua DPR-RI, menghasilkan Keputusan sebagai berikut :

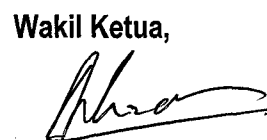
1. Komisi IX DPR-RI belum dapat menerima alokasi anggaran untuk fungsi program dan kegiatan Ditjen Binalattas
2. Komisi IX DPR-RI meminta Ditjen Binalattas memperbaiki rencana kerja dan anggaran Ditjen Binalattas Tahun 2012 sesuai masukan-masukan dari rapat dengar pendapat pada hari ini Selasa, 27 September 2011.

Rapat diakhiri pukul 23.25 WIB.

Jakarta, 27 September 2011  
PIMPINAN KOMISI IX DPR RI

Wakil Ketua,  


Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ

Wakil Ketua,  


dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, SpAn

Wakil Ketua,

  
Ir. SOEPRIYATNO